BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional diawali dengan membuat fondasi ekonomi yang kuat sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus meningkatkan pendapatan negara agar dapat menunjang keberhasilan pembangunan. Sumber penerimaan negara yang paling besar berasal dari sektor perpajakan. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk dapat meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan, salah satu upayanya antara lain dengan melakukan pemberantasan pada mafia pajak dan perbaikan pada sistem perpajakan.

Untuk melakukan pembangunan nasional ini, diperlukan kerja sama antara pemerintah di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu daerah. Pembiayaan daerah awalnya hanya berasal dari pemerintah pusat saja, akan tetapi, dengan adanya otonomi daerah, pembiayaan tidak hanya berasal dari pemerintah pusat saja melainkan berasal dari daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Sumber pendapatan asli daerah yang paling utama tetap berasal dari sektor perpajakan yang disebut sebagai pajak daerah.

Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan otonomi daerah menurut Rondinelli dan Cheema (2008:5), adalah proses pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi unit-unit pelaksana pemerintah daerah atau organisasi non-pemerintah.

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah. Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan imbalan yang diterima tidak dirasakan secara langsung digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Pendapatan asli daerah menurut Mardiasmo (2002:132), merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009, pajak daerah terdiri dari lima jenis pajak daerah tingkat I (Provinsi) dan 11 jenis pajak daerah Tingkat II, meliputi:

1. Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
2. Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Setiap daerah di Indonesia memiliki dinas pendapatan yang berwenang menarik semua pajak daerah dari setiap objek pajak. Hal ini sama dengan Kota Cimahi yang memiliki Dinas Pendapatan Daerah yang mengatur pemungutan pajak. Kota Cimahi menunjukkan perkembangan yang mempunyai karakteristik perkotaan, sehingga yang semula berstatus Kawedanan Cimahi, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1975 ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif. Pada saat itu Kota Cimahi merupakan Kota Administratif pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia, setelah Kota Administratif Blitung di Sulawesi Utara dan Banjar Baru di Kalimantan Selatan. Berdasarkan Undang-Undang No.9 Tahun 2001 Kota Administratif Cimahi di tingkatkan kembali statusnya menjadi Kota Cimahi.

Sejak statusnya menjadi kota, Kota Cimahi mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat. Perkembangan Kota Cimahi dapat dilihat dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berkembangnya Kota Cimahi sebagai kota besar dapat pula dilihat dengan semakin banyaknya pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran yang dapat menarik minat para wisatawan dan para

investor, sehingga bisnis rumah makan, perhotelan dan parkir pun turut mengalami pengembang.

Alfred Wijaya (2009) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan asli daerah Kota Bandung sebesar 21,08%, sedangkan sisanya sebesar 78,92% merupakan pengaruh dari faktor lain yang diabaikan.

Laurentina (2011) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 23.4%, sedangkan sisanya sebesar 76.6% merupakan pengaruh dari faktor lain.

Chaberte Nathalie Valent (2012) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah, survei pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak di Kota Bandung dan memiliki hubungan yang sangat kuat dan searah (positif) sebesar 0.537.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel penelitiannya dimana Alfred Wijaya (2009) dan Laurentina (2011) menggunakan variabel penelitian pajak parkir. Chaberte Nathalie Valent (2012) menggunakan variabel penelitian pajak hiburan. Sedangkan peneliti akan menggunakan variabel penelitian: pajak parkir, pajak hotel, dan pajak restoran. Berdasarkan hal tersebut,

penulis akan melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi**".

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak hotel, pajak parkir, dan pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kota Cimahi,
2. Apakah pajak hotel, pajak parkir, dan pajak restoran berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Kota Cimahi,
3. Seberapa besar pengaruh pajak hotel, pajak parkir, dan pajak restoran secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kota Cimahi,
4. Seberapa besar pengaruh pajak hotel, pajak parkir, dan pajak restoran secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Kota Cimahi.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pajak hotel, pajak parkir, dan pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui apakah pajak hotel, pajak parkir, dan pajak restoran berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak hotel, pajak parkir, dan pajak restoran secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Kota Cimahi.

4. Untuk mengetahui seberapa pengaruh pajak hotel, pajak parkir, dan pajak restoran secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kota Cimahi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak terkait yaitu:

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan mengenai pajak daerah.

2. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai besarnya kontribusi dari pajak parkir, pajak restoran, dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Cimahi, dan pemerintah juga diharapkan untuk lebih dapat memaksimalkan penghasilan daerahnya terutama dari sektor pajak parkir, pajak restoran dan pajak hotel.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tentang pajak daerah.